

Kesenjangan Petani Sawit Inti dan Plasma dalam Perspektif Rational Peasant: Implikasi Penguatan Kelembagaan

Sintia Nur Afika, Taryono, Andini Anugrah, Sinta Ramadani, M.Gea Claudya
*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau,
Jl.HR. Soebrantas Km.12,5 Pekanbaru*

E-mail: sintia.nur1074@student.unri.ac.id, taryono@lecturer.unri.ac.id,
andini.anugrah1075@student.unri.ac.id, sinta.ramadani7511@student.unri.ac.id,
m.gea6582@student.unri.ac.id

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit memegang posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, namun kesenjangan produktivitas antara petani inti dan plasma hingga kini masih menjadi tantangan serius. Artikel ini mengkaji akar persoalan tersebut melalui pendekatan teori rational peasant, yang memandang keputusan petani kecil sebagai respons rasional terhadap keterbatasan modal, risiko ekonomi, dan minimnya dukungan kelembagaan. Bibit tidak bersertifikat, rendahnya adopsi teknologi, serta lemahnya akses pembiayaan formal merupakan konsekuensi logis dari kalkulasi risiko yang dilakukan petani swadaya dalam kondisi ketidakpastian pasar. Kajian ini juga menganalisis hambatan implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang keduanya memerlukan fondasi kelembagaan yang kuat agar dapat diakses secara optimal oleh petani kecil. Temuan menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan petani melalui kelompok tani dan koperasi adalah kunci utama dalam memutus lingkaran produktivitas rendah, karena kelembagaan berperan sebagai jembatan akses terhadap modal, teknologi, pendampingan teknis, dan program pemerintah. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem perkebunan sawit rakyat yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: petani sawit, kesenjangan inti plasma, rational peasant, kelembagaan petani, PSR.

ABSTRAK

Oil palm plantations hold a strategic position in Indonesia's economic structure; however, the productivity gap between nucleus and plasma farmers remains a serious challenge. This article examines the root causes of this issue through the rational peasant theory approach, which views smallholder farmers' decisions as rational responses to limited capital, economic risks, and weak institutional support. The use of uncertified seedlings, low technology adoption, and limited access to formal financing are logical consequences of the risk calculations made by independent farmers under

conditions of market uncertainty. This study also analyzes the barriers to the implementation of the Smallholder Palm Oil Replanting Program (PSR) and Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification, both of which require a strong institutional foundation to be optimally accessible to smallholders. The findings indicate that strengthening farmer institutions through farmer groups and cooperatives is the key to breaking the cycle of low productivity, as institutions serve as a bridge to access capital, technology, technical assistance, and government programs. Synergy among the government, private sector, and financial institutions is essential to create a productive, inclusive, and sustainable smallholder oil palm plantation ecosystem.

Keywords: oil palm farmers, nucleus-plasma gap, rational peasant, farmer institutions, PSR.

1. PENDAHULUAN

Industri kelapa sawit Indonesia menempati posisi sentral dalam perekonomian nasional, baik sebagai penghasil devisa maupun sumber penghidupan jutaan keluarga petani di wilayah perdesaan. Indonesia dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, dan kontribusi petani kecil dalam angka produksi nasional tidak dapat diabaikan begitu saja. Sekitar 40% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola oleh petani kecil atau *smallholders*, yang tersebar di berbagai provinsi, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa produktivitas petani kecil, khususnya petani plasma dan swadaya, masih tertinggal jauh dibandingkan perkebunan besar milik perusahaan. Rata-rata produktivitas sawit rakyat hanya berkisar antara 2 hingga 3 ton CPO per hektar per tahun, angka yang jauh di bawah potensi optimal yang dapat dicapai dengan pengelolaan yang baik. Kesenjangan ini bukan semata persoalan teknis, melainkan merupakan cerminan dari ketidaksetaraan struktural yang lebih dalam, mencakup

keterbatasan akses modal, teknologi, informasi, serta lemahnya kelembagaan petani.

Untuk memahami mengapa kondisi ini bertahan dan sulit berubah, teori rasional peasant memberikan kerangka analisis yang relevan. Dalam perspektif ini keputusan petani untuk menggunakan bibit murah, menghindari investasi jangka panjang, atau tidak mengadopsi teknologi baru bukanlah cerminan dari kebodohan atau kemalasan. Sebaliknya, keputusan tersebut merupakan respons rasional yang dilandasi oleh perhitungan untung-rugi di tengah keterbatasan dan ketidakpastian yang mereka hadapi setiap harinya. Petani kecil cenderung memprioritaskan stabilitas dan keselamatan ekonomi rumah tangga di atas optimalisasi keuntungan jangka panjang.

Di sisi kebijakan, pemerintah telah menghadirkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya mengatasi rendahnya produktivitas akibat penggunaan bibit asalan dan tanaman yang menua. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga dirancang untuk mendorong praktik budidaya yang berkelanjutan sekaligus

membuka akses pasar yang lebih luas. Namun dalam implementasinya, kedua program ini masih menemui kendala serius, terutama karena banyak petani kecil tidak memiliki kelembagaan yang cukup kuat untuk memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.

Artikel ini bertujuan mengkaji tiga hal utama:

- 1) mendeskripsikan bentuk dan akar kesenjangan antara petani inti dan plasma.
- 2) menganalisis perilaku petani kecil melalui lensa teori rasional peasant.
- 3) merumuskan strategi penguatan kelembagaan petani sebagai solusi untuk meningkatkan akses terhadap PSR dan sertifikasi ISPO.

Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menghimpun dan mensintesis berbagai literatur ilmiah yang relevan.

2. PERSAMAAN

Artikel ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan yang bersifat kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena kajian bertujuan membangun sintesis konseptual dan analisis kritis terhadap fenomena kesenjangan petani sawit inti dan plasma, bukan untuk menghasilkan data primer dari lapangan.

1.1 Kesejangan Struktural Petani Sawit Inti dan Plasma

Pola inti-plasma dalam perkebunan kelapa sawit dirancang sejak awal sebagai instrumen pemerataan pembangunan, di mana perusahaan inti berperan membimbing petani plasma melalui penyediaan teknologi, jaminan pasar, dan pembinaan manajerial. Seiring berjalannya

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan produktivitas sawit rakyat, teori rasional peasant, kelembagaan petani, program PSR, dan sertifikasi ISPO. Pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data ilmiah daring dengan kriteria relevansi tema, kebaruan publikasi dan kredibilitas sumber.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap:

- (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan.
- (2) pemetaan tema dan isu utama secara sistematis.
- (3) sintesis temuan untuk membangun argumentasi analitis.

Teori rasional peasant yang dikembangkan dalam tradisi ekonomi politik agraria digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menafsirkan perilaku petani kecil dalam keterbatasan struktural yang mereka hadapi. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk merumuskan implikasi kebijakan, khususnya terkait penguatan kelembagaan petani sebagai strategi intervensi.

3. HASIL PEMBAHASAN

waktu, desain kelembagaan ini tidak menghasilkan kesetaraan yang diharapkan. Petani plasma, apalagi petani swadaya yang berada di luar skema kemitraan, mengalami ketertinggalan produktivitas yang semakin melebar dibandingkan perkebunan inti milik perusahaan besar.

Sokoastri et al. (2020) menunjukkan bahwa salah satu faktor paling mendasar yang mendorong kesenjangan ini adalah perbedaan akses terhadap input produksi. Petani plasma dan swadaya sering kali menggunakan bibit uktivitas optimal. Pada saat yang sama, akses terhadap pupuk dan teknologi budidaya modern pun jauh lebih terbatas bagi petani kecil. Woittiez et al. (2024) menegaskan bahwa produktivitas rendah pada perkebunan rakyat berskala global bersumber dari kombinasi faktor-faktor ini, bukan hanya dari satu penyebab tunggal.

Dimensi lain dari kesenjangan ini berkaitan dengan akses pembiayaan. Supriatna et al. (2024) menyimpulkan bahwa keterbatasan akses terhadap kredit formal merupakan hambatan paling signifikan bagi petani kecil dalam melakukan investasi produktif, termasuk peremajaan tanaman dan pembelian input berkualitas. Ketiadaan agunan yang memadai, persoalan legalitas lahan, serta rendahnya literasi keuangan membuat banyak petani kecil terpinggirkan dari sistem keuangan formal, dan terpaksa bergantung pada sumber pembiayaan informal yang mahal. Akibatnya, terbentuklah lingkaran setan: produktivitas rendah menghasilkan pendapatan rendah, dan pendapatan rendah membatasi kemampuan untuk berinvestasi demi meningkatkan produktivitas.

Kesenjangan juga tampak nyata dalam posisi tawar petani di dalam rantai pasok. Witjaksono et al. (2024) mengungkap bahwa model rantai pasok yang tidak efisien menyebabkan petani kecil sangat bergantung pada tengkulak atau perantara dalam menjual

tidak bersertifikat yang secara genetik memiliki potensi hasil lebih rendah, sementara perkebunan inti menggunakan varietas unggul dengan prod

tandan buah segar, sehingga harga yang mereka terima sering kali

jauh dari harga pasar yang wajar. Posisi tawar yang lemah ini secara langsung menekan margin pendapatan petani dan memperkecil ruang untuk melakukan reinvestasi. Nabila et al. (2025) menambahkan bahwa kekuatan kelembagaan menjadi faktor pembeda yang krusial: petani yang tergabung dalam kemitraan yang solid cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pasar, teknologi, dan pendampingan, sementara petani swadaya yang tidak memiliki kelembagaan yang kuat tertinggal dalam hampir semua dimensi.

Aspek keberlanjutan turut mempertegas kesenjangan ini. Perusahaan inti pada umumnya telah menerapkan standar pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan memiliki sertifikasi keberlanjutan, sehingga produk mereka lebih mudah diterima di pasar global yang semakin selektif. Sebaliknya, petani kecil masih menghadapi kendala besar dalam memenuhi standar tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada daya saing produk sawit rakyat di pasar ekspor (Hadi et al., 2023; Amalia, 2023). Dengan demikian, kesenjangan antara petani inti dan plasma bukan sekadar persoalan teknis produksi, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi perdesaan Indonesia.

1.2 Perilaku Petani dalam Perspektif Rational Peasant

Memahami mengapa petani kecil membuat keputusan yang tampaknya kontraproduktif, seperti menggunakan bibit berkualitas rendah atau menghindari program peremajaan, memerlukan perspektif analitis yang tepat. Teori rational peasant memberikan jawaban

yang lebih nuansa dibandingkan asumsi sederhana bahwa petani bertindak tidak efisien karena kurang pengetahuan. Teori ini menegaskan bahwa petani adalah aktor rasional yang mengambil keputusan berdasarkan kalkulasi manfaat dan risiko sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Dalam konteks perkebunan sawit, penggunaan bibit tidak bersertifikat oleh petani kecil merupakan contoh klasik dari rasionalitas yang dibatasi oleh keterbatasan (*bounded rationality*). Bibit unggul memang menjanjikan produktivitas yang jauh lebih tinggi, namun membutuhkan investasi awal yang besar dan hasilnya baru dirasakan bertahun-tahun kemudian. Bagi petani yang hidup dalam ketidakpastian harga komoditas dan tanpa jaring pengaman finansial yang memadai, memilih bibit yang lebih murah dan tersedia secara lokal adalah keputusan yang secara ekonomi dapat dibenarkan dalam jangka pendek (Sokoastri et al., 2020). Risiko kehilangan pendapatan yang tidak tergantikan selama masa penanaman ulang adalah ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

Pola yang sama berlaku dalam konteks adopsi teknologi budidaya. Meskipun berbagai inovasi teknis telah terbukti meningkatkan

produktivitas secara signifikan, laju adopsinya di kalangan petani kecil cenderung lambat. Witjaksono et al. (2024) menjelaskan bahwa ketidakpastian terhadap hasil yang akan diperoleh dari penerapan inovasi baru, ditambah ketiadaan jaminan pasar dan mekanisme perlindungan risiko, mendorong petani untuk mempertahankan cara bercocok tanam yang sudah familiar. Rasionalitas ini bukan irrasional, melainkan merupakan strategi bertahan hidup yang masuk akal dalam konteks struktur risiko yang tinggi dan asimetris.

Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal semakin mempersempit ruang pilihan yang tersedia bagi petani. Supriatna et al. (2024) menekankan bahwa tanpa dukungan modal yang memadai, petani tidak memiliki alternatif lain selain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meski hasilnya jauh dari optimal. Dalam perilaku petani yang sering kali dianggap sebagai inefisiensi sesungguhnya merupakan respons yang logis dan dapat diprediksi terhadap keterbatasan struktural yang mengelilingi mereka.

Dimensi sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk rasionalitas petani. Nabila et al. (2025) menemukan bahwa keputusan petani dalam praktik budidaya sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di komunitas setempat dan oleh keterbatasan arus informasi yang tersedia. Petani cenderung mengikuti praktik yang lazim dilakukan oleh tetangga dan sesama petani di sekitarnya, bukan karena mereka tidak ingin berubah, tetapi karena informasi tentang alternatif yang lebih baik tidak tersedia secara merata dan mudah diakses.

Teori rational peasant juga menjelaskan rendahnya partisipasi petani dalam Program PSR. Syafira et al. (2024) mencatat bahwa meskipun PSR menawarkan manfaat yang nyata dalam jangka menengah dan panjang, banyak petani enggan berpartisipasi karena mengantisipasi hilangnya pendapatan selama masa peremajaan yang bisa berlangsung tiga hingga empat tahun. Kerumitan prosedur administratif yang harus dipenuhi juga menjadi faktor yang menambah beban kalkulasi bagi petani yang sumber dayanya terbatas. Implikasinya jelas: kebijakan yang ingin mengubah perilaku petani tidak cukup hanya menawarkan manfaat jangka panjang, tetapi harus secara aktif mengelola dan mengurangi risiko jangka pendek yang dirasakan petani.

1.3 Peran Strategis Kelembagaan Petani Di tengah berbagai keterbatasan

yang membelit petani kecil, kelembagaan hadir sebagai salah satu variabel intervensi yang paling menjanjikan. Kelompok tani, koperasi, dan berbagai bentuk asosiasi petani pada dasarnya merupakan mekanisme kolektif yang memungkinkan petani kecil untuk mengatasi keterbatasan individual melalui tindakan bersama yang terorganisir. Witjaksono et al. (2024) menegaskan bahwa kelembagaan yang kuat dapat secara langsung memperbaiki posisi tawar petani dalam rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada perantara, dan membuka akses terhadap harga yang lebih adil.

Dalam aspek akses terhadap input produksi, kelembagaan memberi keuntungan yang nyata. Melalui pembelian kolektif, petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat

memperoleh pupuk dan bibit unggul dengan harga yang lebih kompetitif sekaligus memastikan ketersediaan pasokan yang lebih stabil. Supriatna et al. (2024) menunjukkan bahwa kelembagaan berperan krusial dalam menjembatani akses petani kecil terhadap pembiayaan formal, karena pengajuan kredit secara kolektif melalui kelompok tani atau koperasi dapat mengurangi risiko yang ditanggung lembaga keuangan dan meningkatkan peluang persetujuan kredit bagi petani yang secara individual tidak memenuhi syarat.

Peran kelembagaan dalam mempercepat difusi teknologi dan pengetahuan agronomi juga tidak kalah pentingnya. Nabila et al. (2025) membuktikan bahwa tingkat keberlanjutan dan produktivitas perkebunan sawit rakyat berkorelasi positif dengan kekuatan organisasi petani. Melalui kelembagaan, informasi tentang teknik budidaya terbaik, harga pasar terkini, dan peluang program pemerintah dapat mengalir lebih merata ke seluruh anggota. Dengan kelembagaan berfungsi sebagai katalis yang mempercepat peningkatan kapasitas petani secara kolektif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kelembagaan petani berfungsi sebagaimana mestinya. Sokoastri et al. (2020) mencatat bahwa banyak kelompok tani yang keberadaannya hanya bersifat formalitas administratif tanpa

aktivitas yang substantif dan berkelanjutan. Lemahnya kapasitas pengelolaan organisasi, rendahnya partisipasi dan rasa memiliki dari anggota, serta minimnya pendampingan dari

pihak eksternal menjadi penyebab utama disfungsi kelembagaan ini. Kondisi ini menegaskan bahwa pembentukan kelembagaan saja tidak cukup yang dibutuhkan adalah penguatan kapasitas dan pendampingan yang konsisten dan terstruktur.

1.4 Efektivitas Program PSR dan Tantangan Implementasinya

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu intervensi kebijakan paling ambisius pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Program ini secara langsung menyoal inti masalah, yakni kondisi tanaman yang sudah melewati masa produktif optimal dan penggunaan bibit asalan yang menghasilkan potensi produksi rendah. Melalui PSR, petani mendapat akses terhadap bibit unggul bersertifikat, dukungan pembiayaan yang sebelumnya tidak terjangkau, serta pendampingan teknis yang intensif. Putri et al. (2023) mengonfirmasi bahwa petani yang berhasil mengikuti program PSR mengalami peningkatan hasil produksi yang signifikan, yang pada gilirannya berdampak positif pada kesejahteraan rumah tangga mereka.

menjadi lebih menarik bagi petani yang berpikir dalam cakrawala jangka pendek karena tekanan ekonomi sehari-hari.

Peran kelembagaan dalam keberhasilan PSR terbukti sangat menentukan. Nabila et al. (2025) dan Syafira et al. (2024) secara konsisten menunjukkan bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani atau koperasi yang aktif memiliki peluang jauh lebih besar untuk berhasil mengakses dan menyelesaikan program PSR dibandingkan petani yang bekerja

Meskipun potensi manfaatnya besar, implementasi PSR masih menghadapi tantangan serius yang membatasi jangkauannya. Syafira et al. (2024) mengidentifikasi bahwa kendala administratif, terutama terkait persyaratan legalitas lahan dan kewajiban keanggotaan dalam kelembagaan petani yang terdaftar, menjadi batu sandungan utama bagi banyak petani kecil. Sebagian besar petani swadaya belum memiliki dokumen kepemilikan lahan yang lengkap dan sah, sehingga secara otomatis tidak memenuhi syarat untuk mengakses program ini.

Dari teori *rational peasant*, keengganan sebagian petani untuk berpartisipasi dalam PSR bahkan ketika mereka memenuhi persyaratan administratif pun dapat dipahami secara logis. Risiko kehilangan sumber pendapatan utama selama periode tiga hingga empat tahun masa peremajaan, tanpa kepastian jaminan pendapatan pengganti, merupakan ancaman yang sangat nyata bagi kelangsungan hidup ekonomi rumah tangga petani. Program PSR perlu dilengkapi dengan mekanisme kompensasi atau jaminan pendapatan sementara agar kalkulasi risiko-manfaat secara individual. Kelembagaan memfasilitasi proses pengajuan dokumen secara kolektif, menyediakan forum berbagi informasi dan pengalaman, serta menjadi mitra pelaksana yang diakui oleh pemerintah dalam pengelolaan program.

1.5 Sertifikasi ISPO: Peluang dan Hambatan bagi Petani Kecil

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merepresentasikan ambisi Indonesia untuk memposisikan sawit nasional sebagai komoditas yang tidak hanya produktif secara

ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Bagi petani kecil, sertifikasi ISPO menawarkan sejumlah peluang nyata, termasuk peningkatan nilai jual produk, akses ke segmen pasar premium yang mensyaratkan bukti keberlanjutan, dan pendorong bagi perbaikan praktik agronomi yang berkelanjutan. Rahutomo et al. (2023) mengonfirmasi bahwa petani yang telah menjalani proses sertifikasi ISPO memperlihatkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan kelompok petani yang belum tersertifikasi, yang mengindikasikan bahwa proses sertifikasi itu sendiri mendorong adopsi praktik budidaya yang lebih baik.

Dari sudut pandang rasional peasant, keengganan petani kecil untuk mengejar sertifikasi ISPO mencerminkan pola kalkulasi yang serupa dengan keengganan mereka terhadap PSR. Manfaat sertifikasi, seperti akses pasar premium dan harga jual yang lebih baik, bersifat tidak pasti dan baru akan dirasakan dalam jangka menengah hingga panjang, sementara biaya dan beban proses sertifikasi harus ditanggung di muka. Dalam kondisi demikian, petani yang hidup dengan margin pendapatan yang tipis akan sangat berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk kegiatan yang manfaatnya belum konkret dirasakan.

Sinergi antara PSR dan ISPO menawarkan jalur yang lebih efisien bagi peningkatan kapasitas petani kecil. Syafira et al. (2024) menjelaskan bahwa petani yang telah menyelesaikan program PSR berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk memenuhi standar ISPO, karena mereka telah

Tingkat adopsi ISPO di kalangan petani kecil hingga saat ini masih jauh dari menggembirakan. Amalia (2023) menemukan bahwa rendahnya pemahaman petani terhadap standar dan prosedur ISPO, ditambah dengan biaya sertifikasi yang signifikan, menjadi hambatan utama. Hadi et al. (2023) menambahkan bahwa lemahnya kelembagaan petani dan kurangnya pendampingan teknis yang berkelanjutan turut berkontribusi pada lambatnya proses sertifikasi. Azizah (2020) secara khusus mencatat bahwa sebagian besar petani swadaya belum memenuhi standar praktik budidaya yang baik, yang merupakan prasyarat mendasar untuk memperoleh sertifikasi ISPO.

menggunakan bibit unggul bersertifikat dan telah melalui proses pendampingan teknis yang terstruktur. Integrasi kedua program ini, didukung oleh kelembagaan petani yang kuat, berpotensi menciptakan jalur peningkatan kapasitas yang lebih sinergis dan efisien bagi petani sawit rakyat.

1.6 Strategi Penguatan Kelembagaan sebagai Solusi Komprehensif

Sintesis dari seluruh analisis di atas mengarah pada satu kesimpulan strategis yang konsisten yaitu penguatan kelembagaan petani merupakan fondasi yang tidak bisa dihindari dalam setiap upaya serius untuk mengatasi kesenjangan produktivitas sawit rakyat. Kelembagaan berperan sebagai titik simpul yang menghubungkan petani kecil dengan akses modal, teknologi, informasi, dan program pemerintah secara sekaligus. Tanpa kelembagaan yang berfungsi efektif, intervensi teknis dan program kebijakan sekalipun tidak

akan mampu menjangkau dan memberdayakan petani yang paling membutuhkan.

Penguatan kelembagaan yang efektif harus mencakup beberapa dimensi sekaligus. Pertama, pembentukan dan revitalisasi dengan lebih mudah. Keempat, penguatan peran kelembagaan sebagai fasilitator dalam proses sertifikasi ISPO, termasuk dalam pengumpulan dokumen, koordinasi dengan auditor, dan pemenuhan standar teknis secara kolektif (Supriatna et al., 2024; Nabila et al., 2025).

Keberlanjutan upaya penguatan kelembagaan ini memerlukan komitmen multistakeholder yang kuat. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur administratif PSR dan ISPO, meningkatkan intensitas sosialisasi program, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pendampingan kelembagaan. Sektor swasta, terutama perusahaan inti yang memiliki jaringan dan kapasitas teknis, dapat berkontribusi melalui program kemitraan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pengembangan kapasitas petani plasma. Lembaga keuangan perlu mengembangkan produk kredit yang dirancang khusus untuk kebutuhan petani sawit kecil, dengan mempertimbangkan karakteristik arus kas dan risiko yang spesifik untuk komoditas ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, kesenjangan produktivitas antara petani sawit inti dan plasma di Indonesia bersifat multidimensional, mencakup keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, informasi, serta lemahnya posisi dalam rantai pasok. Kondisi ini mencerminkan

kelompok tani serta koperasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki program kerja yang konkret dan terukur. Kedua, peningkatan kapasitas manajerial dan teknis

ketimpangan struktural dalam pembangunan ekonomi perdesaan. Melalui pendekatan teori rational peasant, penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku petani kecil merupakan respons rasional terhadap keterbatasan sumber daya dan tingginya risiko usaha, bukan sekadar ketidakefisienan.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan sertifikasi ISPO memiliki potensi dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh lemahnya kelembagaan petani. Karena itu penguatan kelembagaan menjadi kunci strategis untuk meningkatkan akses petani terhadap berbagai sumber daya sekaligus mendorong transformasi menuju sistem perkebunan sawit yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan kelembagaan petani diperlukan untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D. N. (2023). The impact of implementing ISPO policy on increasing the income of independent oil palm farmers. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 26(2). <https://doi.org/10.22437/jiseb.v26i02.27004>
- Anggara, R. T., & Alfahma, E. G. (2025). Efficiency analysis of smallholder palm oil plantations in Indonesia: Implications for sustainable resource management. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 13(1), Article 1349.
- Azizah. (2020). Analisis penerapan ISPO pada perkebunan kelapa sawit pekebun swadaya di Kota Dumai. *Jurnal Agribisnis*, 22(1).
- Barriers and readiness for implementation of Indonesian sustainable palm oil in independent smallholders plantations: A case study. (2025). *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*. <https://doi.org/10.61511/hjtas.v2i2.2025.1146>
- Danylo, O., et al. (2020). Satellite reveals age and extent of oil palm plantations. *Remote Sensing*.
- Hadi, S., Bakce, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F. (2023). Strategi
- Sari, M. I. (2022). Analisis kelapa sawit capaian ISPO perkebunan kelapa sawit pola swadaya. *Jurnal Agribisnis* <https://doi.org/10.31849/agr.v24i1.7316>
- percepatansertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 21–42. <https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.21-42>
- Hasbullah, R., et al. (2025). Implementasi PSR di Indonesia. *JURRISH*. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6111>
- Nabila, A., Nasution, Z. P., & Agustira, M. A. (2025). Assessing the sustainability level of oil palm smallholders plantation business using RAPPO method. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 33(2), 291. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v33i2.291>
- Nurhaliza, et al. (2021). Peran penyuluh dalam penerapan ISPO. *JSEP*. <https://doi.org/10.19184/jsep.v14i3.25705>
- Rahutomo, A. B., Karuniasa, M., & Frimawaty, E. (2023). Peningkatan produktivitas lahan pekebun melalui sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 43–55. <https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.43-55>
- Sintha, T. Y. E., et al. (2023). Issues and strategies for accelerating the implementation of sustainable smallholder oil palm rejuvenation program in Indonesia. *Journal of*

- World Science, 2(9).
<https://doi.org/10.58344/jws.v2i9.416>
- Sokoastri, V., Setiadi, D., Rakhman Hakim, A., Mawardhi, A. D., & Fadli, M. L. (2019). Smallholders oil palm: Problems and solutions. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(3), 182–194.
<https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27221>
- Supriatna, E., Firmansyah, H., & Dewi, S. (2024). Access to finance and productivity of smallholder palm oil farmers. *Journal of Development Economics*, 162, 102–115.
- Syafira, R., et al. (2024). Analisis kendala program PSR. *Jurnal Ilmiah Global Education*.
<https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2469>
- Taryono, T., Sari, L., & Iyan, R. (2023). Pemetaan potensi sumberdaya lahan gambut di Desa Sumber Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Daya Saing*, 9(3).
<https://doi.org/10.35446/dayasaing.v9i3.1534>
- Witjaksono, J., et al. (2024). Corporate farming model for sustainable palm oil supply chain. *Frontiers in Sustainable Food Systems*.
<https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1418732>
- Woittiez, L. S., et al. (2024). Global smallholder oil palm productivity: Challenges and opportunities. *Agriculture*, 14(9), 1626.
<https://www.mdpi.com/2077-0472/14/9/1626>